

MUHAMMADIYAH DAN PERGERAKAN POLITIK ALIRAN

by Dyah Mutiarin

Submission date: 24-Oct-2019 10:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 1199240835

File name: Bidang_C.19-_Dyah_Mutiarin.pdf (9.81M)

Word count: 5107

Character count: 32737

MAARIF¹⁹

ISLAM DAN SOSIAL

MUHAMMADIYAH & FENOMENA RADIKALISME - TERORISME DI INDONESIA



ALIMATUL QIBTIYAH | SYARI MUHAMMAD | HAMIM ILYAS
HENDAR RIYADI | MOH. SHOFAN | PIPIT AIDUL FITRIYANA | SAEFUDIN ZUHRI
SAID ROMADLAN | SRI ROSVIANA | ZULY QODIR

Penanggung Jawab	Ahmad Syafii Maarif Jeffrie Geovanie Rizal Sukma
Pemimpin Umum	Muhd. Abdullah Darraz
Pemimpin Redaksi	Zuly Qodir
Wakil Pemimpin Redaksi	Saefudin Zuhri
Dewan Redaksi	Ahmad Najib Burhani Ahmad-Norma Permata Clara Juwono Haedar Nashir Hilman Latief Luthfi Assyaukanie M. Amin Abdullah
Sekretaris Redaksi	M. Supriadi
Redaktur Pelaksana	Khelmy K. Pribadi, Fitri Dzakiyyah Pipit Aidul Fitriyana, Achmad Setiawan
Design Layout	Zulkarnaen
Keuangan	Henny Ridhowati, Titik Lestari
Sirkulasi	Awang Basri, Pripih Utomo
Alamat Redaksi	MAARIF Institute for Culture and Humanity Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6, Jakarta 12810 Telp +62-21 8379 4554 Fax +62-21 8379 5758 website : www.maarifinstitute.org email : maarif@maarifinstitute.org mas.zuhry88@gmail.com darrazophy@yahoo.com
	Donasi dapat disalurkan melalui rekening : Yayasan A. Syafii Maarif BNI MH. Thamrin (Wisma Nusantara) 0114179273
	Terbit Perdana Juni 2003

Redaksi mengundang para cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis untuk mengirimkan tulisan, baik berupa hasil penelitian maupun gagasan, sesuai dengan visi dan misi MAARIF Institute for Culture and Humanity. Tulisan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah dipublikasikan, penulisan mengacu standar ilmiah yang telah ditetapkan oleh redaksi dengan panjang tulisan minimal 4000 kata (10 halaman, 1 spasi, A4) dengan batas maksimal 6000 kata (15 halaman). Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit tulisan tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi. Jurnal MAARIF terbit 2 kali setahun (Juni dan Desember).

Pengantar Redaksi : Muhammadiyah & Fenomena Radikalisme-Terrorisme di Indonesia	3
<i>Zuly Qodir</i> <i>Saefudin Zuhri/Tim Redaksi Jurnal MAARIF</i>	
Artikel Utama	
Islam Kaffah Dalam Perspektif Tarjih	12
<i>Hamim Ilyas</i>	
Muhammadiyah, Revolusi, Mazhab Pemikiran Dan Aksi Untuk Mengawal Peradaban Bangsa	34
<i>Hendar Riyadi</i>	
Diskursus Gerakan Radikalisme Di Kalangan Tokoh Muhammadiyah	54
<i>Said Romadlan</i>	
Muhammadiyah Dan Jalan Terbuka Menuju Radikalisme-Terrorisme (?) ...	73
<i>Moh. Shofan</i>	
Muhammadiyah-Aisyiyah Membendung Radikalisme Dan Terrorisme	84
<i>Sri Rosviana</i>	
Madrasah Perempuan Berkemajuan (Mpb): Upaya Menyebarkan Agama Damai	99
<i>Alimatul Qibtiyah</i>	
Muhammadiyah Dan Pergerakan Politik Aliran.....	118
<i>Dyah Mutiarin</i>	
Riset	
Muhammadiyah, Moderatisme Dan Gerakan Radikalisme: Studi Kasus Di Surakarta	132
<i>Zuly Qodir</i>	
Khasanah	
Oase di Tengah Konflik Poso: Mosintuwu Institute Gerakan Perempuan Dan Perdamaian	153
<i>Pipit Aidul Fitriyana dan Saefudin Zuhri</i>	
Profil Penulis	168
Profil MAARIF Institute dan Profil Media	173
Petunjuk dan Format Penulisan Artikel	182

MUHAMMADIYAH DAN PERGERAKAN POLITIK ALIRAN

Dyah Mutiarin

Abstrak

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang besar sungguh memiliki pengaruh yang penting di Indonesia. Bukti pentingnya Muhammadiyah adalah ketika Pemilihan Kepala Daerah, Pilihan Presiden dan Pilihan Legislatif maka warga Muhammadiyah tetap menjadi incaran untuk turut mendukung atau pun mengusung kandidat dari partai politik atau independen. Oleh sebab urusan politik, tidak pernah pula lepas dari urusan identitas, yang di dalamnya persoalan agama. Tulisan ini memberikan penjelasan terkait kehadiran politik identitas dari umat Islam khususnya Muhammadiyah ketika terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden sekaligus menghadapi masalah krusial radikalisme-terorisme yang berkembang di Indonesia sekarang ini. Apa yang menyebabkan Muhammadiyah ditarik pada urusan politik identitas yang disebut politik aliran, dampak yang bisa terjadi dari politik aliran yang berkembang dalam konteks politik Indonesia.

Kata Kunci : Muhammadiyah, Aliran, Politik Identitas.

Pendahuluan

Di akhir tahun 2016, gonjang ganjing politik nasional terjadi ketika di Jakarta terjadi tiga kali aksi yang dilakukan oleh umat Islam terkait dengan Pilkada Jakarta dan Ahok sebagai aktor utamanya. Aksi I September 2016, II Oktober 2016 di Balai Kota tidak menyedot perhatian publik secara luas. Tetapi Aksi

III dan IV yang dikenal dengan istilah Istilah Aksi Bela Islam I dan II dengan *tagline* AKSI BELA ISLAM yang kemudian dikenal luas dengan sebutan AKSI BELA ISLAM 411 dan AKSI BELA ISLAM 212 menjadi peristiwa yang menyita perhatian public Indonesia bahkan luar negeri. Banyak orang kemudian menyebutnya sebagai gerakan *people power* umat Islam Indonesia, sebab dihadiri oleh kurang lebih 5-7 juta manusia dengan berpakaian putih-putih. Sebagian lagi menyebut sebagai gerakan Islam populis, istilah populisme Islam sebagaimana pernah dikemukakan oleh Vedi R Hadiz, ketika membaca gerakan demonstrasi di Timur Tengah dan Indonesia beberapa waktu sebelumnya, sebab melibatkan massa arus bawah yang sebenarnya sebagian besar adalah awam politik.¹

Aksi Bela Islam menjadi besar tentu bukan karena satu penyebab. Terdapat banyak penyebab di sana, baik politik, ekonomi, hukum, kewargaan dan kultural. Inilah yang kemudian memunculkan banyak aktor dan peristiwa di antara satu dengan lainnya saling berkelit berkelindan. Tidak ada yang tunggal di sana. Secara nasional dan lokal kondisi politik kita terus berubah dan tensinya sangat tinggi, terutama menjelang Pilakda serentak di Indonesia. Kita melihat misalnya, sebagian dari peserta aksi menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih terbilang lemah dalam hal penegakan hukum dan ekonomi rakyat. Oleh karenanya dalam Aksi di Jakarta dua isu ini menjadi perhatian para peserta aksi ketika orasi, terutama pada Aksi Bela Islam yang pertama 4-11-2016.

Besarnya aksi Bela Islam dikaitkan dengan dengan lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi selain adanya kasus Gubernur Ahok pada jelang Pilkada DKI Jakarta Februari 2017. Kelemahan kepemimpinan Jokowi tampak dari dua fakta yang terjadi sejak awal kepemimpinannya hingga saat ini, yakni kinerja menteri-menteri kabinet yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan kurang (bahkan tidak) independennya Presiden Jokowi dari tekanan partai-partai politik yang mendukungnya. Kepemimpinan Presiden Jokowi yang lemah ini menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK merosot. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ), sebanyak 51,3 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-

1 Vedi R Hadiz, *Populisme Islam in Indonesia and the Middle East*, ISEAS, Singapore, 2015.

JK.² Sebanyak 78,9 persen publik tidak puas dengan penanganan bencana asap yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK.³

Sedangkan hasil survei yang dilaksanakan oleh lembaga Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 51,26 persen masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK, dengan alokasi presentase 71,79 persen ketidakpuasan terhadap bidang politik, hukum, kesehatan, keamanan, dan pendidikan.⁴ Selaras dengan hasil survei LSJ bahwa angka ketidakpuasan masyarakat lebih dari 50 persen. Maka, dapat dikatakan bahwa angka ketidakpuasan tersebut cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan survei pada enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kualitas kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurun dari 44 persen menjadi 42,95 persen.⁵

Kondisi semacam itu sebenarnya dimulai sejak lama, terutama menjelang Reformasi 1998 dan berkembang sampai saat ini. Analisis yang dilakukan Martin van Bruinnesen terkait dengan genealogi radikalisme di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, NU, sangat memiliki kedekatan (akomodatif) dengan pemerintahan Soeharto, meskipun pada suatu sisi Abdurrahman Wahid sangat anti dan menentang Soeharto. Walaupun demikian, beberapa pemimpin organisasi Islam seperti yang aktif di ICMI, NU, dan beberapa organisasi Islam lainnya sebelum tahun 1950-an dan 1970-an yang bersifat konservatif memiliki pandangan yang sangat sempit tentang umat, sebelum berhubungan dengan dunia internasional akhirnya sangat terbuka setelah tahun 1970-an. Mereka mengakomodasikan tema-tema tentang toleransi dan pluralisme serta demokrasi sebagai bentuk reformasi Islam. Anggota NU muda mendapatkan proteksi dari Abdurrahman Wahid dan memiliki kedekatan (patronase) yang kuat sehingga mampu mengembangkan wacana keagamaan yang diskursif dan kreatif untuk masa-masa akan datang.⁶

2 Kabar Pergerakan.com. "Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK". Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

3 Pernyataan Rendy Kurnia (peneliti utama LSJ), di Jakarta pada Kamis 5 Oktober 2016 dalam Kabar Pergerakan.com. "Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK". Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

4 Kabar Pergerakan.com. "Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK". Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

5 Pernyataan Hanta Yudha (Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia) dalam Kabar Pergerakan.com. "Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK". Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

6 Martin van Bruinnesen, *The History of Radicalism in Southeast Asia*, *Journal of Asean Studies*, vol. vii, tahun 2015.

Dalam versi yang lebih jelas saat ini sedang terjadi gerakan anti Semitisme, yang bersumbu pada adanya gerakan anti China yang pada era Soeharto mendapatkan kekhususan dalam hal bisnis. Tokoh seperti Prabowo Subianto yang mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berupaya dengan sangat keras untuk menjatuhkan kaum yang disebut China dan dianggap pro komunisme. Hal yang dilakukan Prabowo Subianto mirip dengan yang dilakukan ketika mengganyang Zionisme, menggunakan teori konspirasi model *The Protocols of the Elders of Zion*, yakni bersatunya China-Katolik dan Zionis dengan tujuan menghancurkan Islam Indonesia, untuk kemudian menghadirkan kembali kekuatan militer di dalam lingkaran kekuasaan, dengan cara memobilisasi massa rakyat untuk melakukan gerakan anti China melawan dominasi China.⁷

Sementara itu, gejala anti kekuasaan atau anti kelompok tertentu di Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, Vedi R Hadiz menyebutkan gerakan politik populisme Islam (*Islamic populism*) yang menggerakkan umat untuk sebuah gerakan sentimen tertentu atas nama demokrasi. Dalam konteks Indonesia sebenarnya populisme Islam ini cenderung mempergunakan identitas keagamaan dan etnis-suku untuk kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu. Hadiz, (2014: 126-130) menyebutkan bahwa gerakan populisme merupakan gerakan politik yang sedang menjadi kecenderungan di Asia Tenggara selain juga di kawasan Timur Tengah sebelum dan pasca *Arab Spring* (musim semi arab) tahun 2013. Gerakan semacam itu merupakan gerakan politik modern yang mempergunakan massa untuk dimobilisasi secara massif sebagai gerakan perlawanan yang disebut dengan istilah "*ordinary people*-rakyat yang terstruktur berjalan sesuai dengan aturan-pesanan" untuk sebuah kepentingan politik dan efek praktis dari politik global yang dianggap mampu menjadi "jembatan-integrasi" kepentingan antara politisi dan jamaah-masyarakat yang merasa berada dalam politik yang termarginalkan.⁸

Hal seperti itu sebenarnya dapat dibaca sebagai sebuah gerakan politik seperti yang dulu pernah dilakukan Suharto ketika menjunjung kelompok muslim ketika kondisi ekonomi amburuk tahun 1998. Ketika itu aksi kekerasan terhadap kaum China dan perempuan demikian marak, bahkan pembunuhan atas mereka demikian massif di Jakarta dan Surakarta, selain adanya pembakaran toko-toko milik kaum China yang dianggap tidak muslim dan bukan pribumi.

7 Ibid, Bruinessen, 2015.

8 Vedi R. Hadiz, 2014, Hadiz, 2016, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, NUS, Singapore.

Inilah politik anti toleransi dan mendukung kekerasan yang terjadi pada saat Indonesia krisis ekonomi dan kepemimpinan.

Pilkada DKI yang menghadirkan kandidat dari kubu PDI Perjuangan Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Syaiful Hidayat versus Anies Baswedan-Sandiaga Uno dari Gerindra, PAN dan PKS, dapat dikatakan sebagai puncak lahirnya populisme Islam Indonesia atas nama agama dan etnis. Pasangan Ahok-Djarot berhadapan-hadapan secara keras, pasangan Anies-Sandi yang dianggap oleh masyarakat muslim mewakili Islam sementara pasangan Ahok-Djarot dianggap mewakili pasangan Kristen-China, dimobilisasi di masyarakat bawah. Hal ini disebabkan adanya persoalan politis yang dikemukakan oleh tim yang berada dibelakang Anies-Sandi tentang kasus Ahok yang dituduh melakukan pelecehan dan penistaan atas Al-Quran. Isu penistaan al-Qur'an benar-benar dipergunakan sebagai alat mobilisasi massa Islam untuk melakukan politik massa di Jakarta dan provinsi lainnya.

Aksi Bela Islam I dan II (4-11-2016 dan 2-12-2016) adalah bentuk aksi yang bisa dikatakan paling massif untuk urusan Pilkada di Indonesia karena menggunakan sentimen keagamaan untuk kepentingan politik. Sebab aksi yang digelar sebelumnya di depan kantor Gubernur Ahok bulan September dengan isu kepemimpinan yang korup ternyata tidak mampu menyedot massa di Jakarta dan luar Jakarta. Sementara setelah dipergunakan isu tentang penistaan al-Quran massa demikian tertarik dengan mobilisasi yang dilakukan oleh para ustadz, MUI, FPI, tokoh politik anti PDI Perjuangan (Ahok) adalah yang paling massif sepanjang sejarah Pilkada di Indonesia, dengan massa yang cukup besar dikatakan mencapai 7,4 juta jiwa.⁹

Aksi Damai 411 dan 212 awalnya memberikan kesan yang baik kepada khalayak bahwa aksi untuk mendesak pemerintah dapat dilakukan dengan damai. Akan tetapi, akhirnya aksi tersebut menimbulkan isu dan permasalahan yang lain, di antaranya adalah isu makar. Aksi Damai 411 dan 212 diisukan dari oknum-oknum yang ingin menguasai gedung MPR-DPR dengan memanfaatkan Aksi Damai 212. Ada beberapa tokoh yang kemudian diamankan oleh kepolisian atas dugaan kasus makar yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal Kobar.¹⁰

⁹ Kompas, 3/12/2016.

¹⁰ Liputan 6, "Jerat Makar di Aksi Damai 212", Edisi 4 Desember 2016. Ditemukan pada: <http://news.liputan6.com/read/2668730/jerat-makar-di-aksi-damai-212>. diakses pada: 14 Januari 2016 jam 17.36 WIB.

Bahkan Aksi Damai tersebut dijadikan momentum bagi kemunculan tokoh-tokoh muslim seperti Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Bachtiar Nasir, Habib Rizieq, dan Aa Gym. Hal ini dikarenakan Aksi Damai berbeda jauh dengan aksi reformasi 1998 yang aktor utamanya adalah Amien Rais. Namun, pada aksi tersebut tidak ada tokoh utama tunggal seperti Amien Rais. Bahkan, muncul isu bahwa FPI dan GNPf hendak mengusung Habib Rizieq sebagai imam besar di Indonesia dengan memanfaatkan momentum Aksi Damai tersebut. Umat Islam Indonesia berada dalam kondisi yang serba reaktif dan reaksioner atas keadaan yang terjadi. Hal seperti ini tentu saja tidak muncul tiba-tiba tetapi karena beberapa persoalan yang muncul di republik kita tercinta. Pembelahan umat Islam pun akhirnya terjadi dalam kutub yang bisa dikatakan sama-sama keras dan kuatnya. Bagaimana dengan Muhammadiyah?

Haluan Politik Muhammadiyah

Muhammadiyah, sebagai organisasi sosial keagamaan yang modern, dalam kaitannya dengan Aksi Bela Islam 411 dan 212 telah mengeluarkan surat edaran dari PP Muhammadiyah agar warga Muhammadiyah lebih baik mengurus masalah lain yang jauh lebih besar, ketimbang energinya habis untuk mengurus Aksi. Tetapi himbauan yang dilakukan PP Muhammadiyah agaknya tidak ditanggapi secara maksimal oleh para pimpinan di level Wilayah (Provinsi), daerah (Kabupaten) maupun Cabang (Kecamatan), sehingga beberapa dari mereka mengikuti dengan semangat bersama pada pimpinan dan anggota lainnya untuk Aksi di Jakarta. Hal seperti itu dilakukan oleh para pimpinan di Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Denpasar (Bali). Bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa Aksi 411 dan 212 merupakan Aksi untuk Bela Islam di Indonesia. Oleh karena ada tertulis Bela Islam maka warga Muhammadiyah mengikutinya dengan semangat, sebagian menganggap sebagai jihad. Muhammadiyah tidak secara resmi mendukung Aksi Damai 411 dan 212 tersebut. Tetapi para aktivis Muhammadiyah dari berbagai daerah tampak hadir di sana dan mendukung. Sikap tidak mendukung tetapi juga tidak melarang sebenarnya disayangkan oleh warga Muhammadiyah, sebab Pemuda Muhammadiyah melalui ketuanya turut ambil bagian dari Aksi damai tersebut demikian pula Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta.

Sebagai organisasi Islam yang besar, Muhammadiyah tentu diharapkan perannya dalam berbangsa dan bernegara. Peran-peran sosial keagamaan, dalam bidang pendidikan, pembangunan rumah sakit dan panti asuhan dari Muhammadiyah tidak dapat diragukan lagi. Tetapi peran politik sebagai representasi dari

umat Islam, posisi Muhammadiyah kadang dipertanyakan oleh umat Islam, bahkan warga Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah seringkali dilihat oleh warganya kurang hadir dalam pentas politik nasional yang sedang bergejolak. Muhammadiyah terlihat kurang cepat dalam memberikan respon masalah umat Islam yang muncul. Bisa saja warga Muhammadiyah atau umat Islam yang tidak memahami atau melihat secara langsung aktivis politik Muhammadiyah, karena Muhammadiyah lebih memilih *soft politics* atau *high politics* ketimbang *low politics* atau *hard politics*. Tetapi umat Islam dan warga Muhammadiyah agaknya berharap lain pada organisasi Islam modern ini. Warga Muhammadiyah dan umat Islam tampaknya lebih memilih jika Muhammadiyah terlibat aktif berpolitik.

Muktamar ke-47 Muhammadiyah merekomendasikan 13 hal untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa khidmat 2015-2020. Mukhtamar Muhammadiyah menyoroti berbagai isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Terdapat 13 rekomendasi Mukhtamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun hal yang sangat penting dengan kondisi kebangsaan dan keagamaan (keislaman sekarang adalah hal terkait dengan munculnya radikalisme dan terorisme) yang berkembang di Indonesia.

Sebagai organisasi Islam terbesar dengan kontribusi yang sangat banyak, Muhammadiyah telah menyatakan sebagai organisasi Islam moderat (Islam *wastahan-wasathiyah*) yang bertujuan mengembangkan cita-cita Islam *rahmatan lil alamin* dan Islam moderat (moderatisme Islam) sebagai wujud Islam *wasathiyah*. Namun di tengah jalan terdapat beberapa gangguan dari lingkungan Islam bahkan warga Muhammadiyah sendiri yang cenderung memiliki pikiran-pandangan dan sikap berbeda dengan kebijakan persyarikatan. Hal inilah yang membutuhkan pengkajian, mengapa terdapat warga Muhammadiyah yang berbeda pandangan-sikap terhadap Islam *wasathiyah*-sebagai Islam moderat yang dikembangkan Muhammadiyah.

Kita dapat mendapatkan gambaran bahwa pandangan dan sikap Muhammadiyah tentang beragama di Indonesia yakni tentang perlunya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Muhammadiyah mengajak umat Islam, khususnya warga Persyarikatan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok *takfiri* (kelompok pemberi label kafir pada yang berbeda) melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interaksisosial yang santun. Pendekatan terhadap teks

yang sering hanya bersifat *bayani* (tekstualitas), oleh Muhammadiyah kemudian dikembangkan menjadi pendekatan *burhani* (analitis), serta *irfani* (bersifat sufistik-perasaan). Tiga pendekatan memahami teks suci dari agama Islam kemudian menjadi mazhab tersendiri dalam berislam ala Muhammadiyah yang diyakini mampu memberikan kontribusi mencegah radikalisme-terorisme yang bersumber dari paham keagamaan.¹¹

Perubahan-perubahan paham teologi dan politik Muhammadiyah terus berubah dan berkembang. Pada saat menjelang Muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, di dalam Muhammadiyah juga berkembang pemikiran perlunya rumusan teologi politik Muhammadiyah yang mampu menempatkan Muhammadiyah dalam lanskap politik nasional secara memadai sebab politik oleh sebagian ahli di Muhammadiyah tidak bisa ditunggu atau Muhammadiyah menunggu “kebaikan politik pihak lawan”. Politik Islam Indonesia tidak bisa lagi berada pada posisi yang konservatif-konvensional, menunggu *virtue* dari para pemimpin partai serta para pemilik kekuasaan. Politik alokatif yang pernah dikemukakan Din Syamsuddin tahun 1990-an, tidak bisa hanya diharapkan dari adanya kebaikan politikus. Alokasi politik haruslah direbut dan diambil alih. Politik haruslah ada perebutan dan perjuangan untuk menuju kearah sana. Oleh sebab itu, menjelang Muktamar Makassar dilakukan kajian seminar terkait teologi politik Muhammadiyah.¹²

Perubahan semacam itu terus berlangsung sampai tahun 2017. Pada saat gerakan populisme Islam terus bergerak di Indonesia. Muhammadiyah diperhadapkan dengan kebangkitan populisme Islam yang seakan-akan mengambil alih peran politik dan teologi Muhammadiyah. Populisme Islam semakin memuncak ketika Indonesia menghadapi berbagai persoalan politik. Vedi R Hadiz, mengemukakan bahwa populisme Islam di Indonesia, juga di negara-negara Timur Tengah bangkit karena adanya persoalan internal dalam negaranya. Persoalan politik, ekonomi, kekuasaan yang jahat, serta kemunculan gelombang demokrasi menyebabkan perubahan pola berpolitik warga negara dengan kekuasaan yang dihadapi. Populisme Islam memberikan tarikan nafas baru dalam dunia politik global yang juga berpengaruh pada Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim. Gerakan populisme Islam bisa dikatakan sebagai gerakan masyarakat sipil yang sangat sporadik tetapi kebangkitannya

11 Mohammad Abid al Jabiri, *Kritik Islam atas Nalar Arab*, 2001, terjemahan Moh. Khoiron Nahdliyin, Ircisod, Yogyakarta, 2007; M. Amin Abdullah, 2008, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Pustaka Pelajar.

12 Zuly Qodir, Achmad Nurmandi (ed), 2015, *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Usaha*, Pascasarjana UMY dan Pustaka Pelajar, 2015.

bersama-sama dengan yang ada di beberapa negara sehingga jika tidak terkontrol akan mencelakakan demokrasi.¹³

Pergerakan Politik Aliran

Populisme Islam Indonesia muncul dengan keras saat jelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Hal itu bisa kita lihat dari fenomena kebangkitan kekuatan sipil dengan bendera agama (Islam) diusung ke tengah tengah arus politik lokal dan nasional. Inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab setelah adanya aksi yang dinamakan sebagai Aksi Bela Islam 2-12-2016 menarik perhatian kita semua. Sebagai Negara dengan penduduk umat Islam terbesar di Indonesia, aksi tersebut sebenarnya tidak mewakili keseluruhan umat Islam, tetapi diikuti oleh ratusan ribu umat Islam yang dikatakan “menggemparkan”.

Hal itu karena ada beberapa hal, *pertama*; dikoordinir oleh MUI yang merupakan lembaga otoritas keagamaan (Islam) di luar negara (sebagai representasi kelompok Islam) dengan kerjasama pelbagai pihak seperti Kepolisian, Pemda dan TNI. *Kedua*; melibatkan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia seperti FPI, Forum Jihad Islam, Forum Ulama Bandung, FUI Bandung, dan elemen ormas lainnya; *ketiga*, warga Muhammadiyah yang datang dari Surakarta, Yogyakarta, Padang dan Bandung. Bahkan Jawa Barat dan Surakarta termasuk penyumbang terbesar pasukan Aksi Bela Islam dari Muhammadiyah mencapai puluhan ribu warga Muhammadiyah.

Padahal kita ketahui, PP Muhammadiyah telah memberikan edaran bahwa umat Islam, Muhammadiyah khususnya tidak perlu melakukan Aksi lagi setelah Aksi 4-11-2016 sebulan sebelumnya karena masih banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan. Banyak masalah yang membutuhkan respons segera dan dari Muhammadiyah. Edaran PP Muhammadiyah memang tidak bisa mengikat warganya agar tidak turut aksi di Jakarta. Sebagian warga Muhammadiyah memiliki pemahaman lain yang berbeda dengan PP Muhammadiyah. Di sinilah persoalan politik aliran di Indonesia ternyata masih menjadi bagian tak terpisahkan dalam realitas politik Indonesia. Sektarianisme politik merupakan fakta yang tidak bisa ditolak sekalipun menjadi pertanda kemunduran politik Indonesia dalam menapaki politik yang lebih demokratis. Di Muhammadiyah pun terjadi sebagai organisasi modern, tetapi warganya itu tidak taat pada organisasi. Oleh sebab itu menimbulkan pertanyaan yang cukup serius pada

13 Vedi R. Hadiz, 2016.

gaya politik Muhammadiyah. Ada apa dengan warga Muhammadiyah yang kemudian tetap turun lapangan mendukung aksi yang dikoordinir oleh Rizieq Shihab dan GNPF di bawah pimpinan Bahtiar Nasir tersebut? Adakah aktor khusus dari lingkungan Muhammadiyah yang menggerakkan dan memiliki agenda tersendiri di luar agenda resmi PP Muhammadiyah yang dikhawatirkan banyak pihak tentang kebangkitan radikalisme di Indonesia?

Apa yang terjadi dalam Muhammadiyah dan umat Islam Indonesia, dapat dijelaskan dalam fenomena populisme Islam dalam kerangka teoritik dalam tradisi gerakan sosial (*social movement*) yang dikemukakan oleh Quintan Wiktorowicz.¹⁴ Ia menjelaskan tentang adanya gerakan sosial keagamaan dalam persepektif gerakan sosial sebagaimana dahulu pernah dikemukakan oleh Charles Tilly. Dalam sebuah gerakan sosial termasuk gerakan populisme Islam, itu tidak bisa dilepaskan dari adanya dimensi yang terdiri dari beberapa hal. Dimensi Pertama, ketegangan-ketegangan struktural yang dianggap sebagai basis adanya gerakan. Dalam pendekatan psiko sosial (psikologi sosial), adanya ketidakseimbangan akan memunculkan adanya ketidakpuasan. Hal ini dianggap wajar adanya. Oleh sebab itu, masyarakat kemudian membuat instrumen keseimbangan antar kelembagaan agar tidak terjadi ketegangan di antara mereka. Namun, seringkali karena adanya ketimpangan sosial maka akan memunculkan ketegangan-ketegangan yang disebabkan kurangnya poisisi yang diakomodir oleh sebuah kekuatan politik tertentu. Politik akomodasi menjadi salah satu kata kunci dari adanya keseimbangan untuk menghindari ketegangan sosial dan mobilisasi sosial.

Dimensi Kedua dari gerakan sosial keagamaan atau pun populisme Islam adalah adanya sumber daya yang dimobilisasi secara massif. Sumber daya manusia yang tersedia karena adanya perasaan terpinggirkan, terdiskriminasi, serta diperlakukan kurang adil akan dengan mudah dimobilisasi sebagai sebuah gerakan. Gerakan mobilisasi sumber daya yang tergorganisasikan merupakan respon yang dilakukan secara sistematis dan disusun dengan tujuan-tujuan tertentu. Massa diorganisasikan dengan kolektif untuk merespons adanya ketidakpuasan yang meluas atas kekuasaan atau politik, ekonomi, dan kesempatan yang dikembangkan oleh para elit politik dan elit agama.

Gerakan mobilisasi sumber daya ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan peringatan dan sekaligus untuk meringankan beban psikologis jamaah yang oleh para elit dianggap terbebani secara sosial ekonomi

14 Quintan Wiktorowicz (ed), 2007. *Islamic Movement, Social Theory Perspective*, USA.

dan politik. Gerakan ini bukanlah sebuah gerakan yang tidak rasional, melainkan sebuah gerakan yang dialamatkan untuk suatu pernyataan bersama (kolektif) atas hal yang dianggap mewakili perasaan banyak pihak dengan cara mekanisme yang dimobilisasi dan secara kolektif terorganisasikan. Tujuan akhir dari mobilisasi massa adalah untuk memberikan tekanan pada politisi atau pemegang kekuasaan agar dapat terpengaruh dengan apa yang dilakukan secara professional. Oleh sebab itu yang dilibatkan dalam gerakan mobilisasi adalah mereka kaum profesional, elit politik, elit agama, tokoh organisasi, elit masyarakat sipil bahkan kalangan militer.¹⁵

Dimensi Ketiga yang sangat penting dari teori gerakan populisme Islam (gerakan sosial keagamaan) adalah adanya kesempatan yang diperoleh dari gerakan ini. Kesempatan ini merupakan peluang yang didapatkan karena adanya gelombang besar perubahan demografi politik global dan memberikan inspirasi pada adanya perubahan politik di sebuah negara. Gerakan-gerakan sosial keagamaan yang sekarang ini muncul bukan berada dalam ruang hampa, tetapi sebagai bagian dari adanya kontekstualisasi dari situasi global sehingga mampu merubah kondisi dan infrastruktur gerakan yang ada di beberapa kawasan (negara), termasuk di Indonesia.

Pemahaman atas kondisi global memberikan menjadikan situasi politik lokal semakin mendapatkan kesempatan untuk berespkresi dan melakukan mobilisasi gerakan secara kolektif. Mobilisasi gerakan ini pada akhirnya juga tidak bisa dilepaskan dari adanya faktor sosial, politik, ekonomi dan budaya suatu negara. Pendekatan ini memiliki kedekatan analisis pada masalah-masalah struktural (politik ekonomi) tetapi sekaligus bisa dianggap mewakili pendekatan yang sifatnya psiko sosial masyarakat. Oleh karenanya, kesempatan politik karena adanya konteks sosial politik ekonomi global dapat memberikan dampak yang serius pada adanya mobilisasi kolektif kekuatan massa.¹⁶

Dimensi terakhir, Keempat, yang tidak bisa dilupakan dari adanya gerakan populisme Islam adalah adanya aktor utama (elit) penggerak mobilisasi sumber daya. Inilah yang dalam gerakan sosial menjadi salah satu kunci adanya mobilisasi massa secara kolektif yang telah diberikan beberapa persoalan terkait isu struktural, ekonomi dan budaya sehingga seorang aktor dengan mudah melakukan mobilisasi kolektif di sebuah negara. Pendek kata mobilisasi bukan berada pada ruang politik hampa tetapi karena adanya konteks sosial politik

¹⁵ *Ibid*, Wictorowicz, 2007.

¹⁶ (Meyer, 2000), *Religion and Globalization*, Sage Publication, USA.

ekonomi bahkan psikologis masyarakat yang merasa dianiaya oleh kekuatan politik tertentu.¹⁷

Selain dengan mempergunakan kerangka pemikiran Quintan di atas, untuk mengategorikan apakah sebuah gerakan jamaah dan jaringan serta aktor itu dapat dikategorikan sebagai gerakan radikal aktif ataukah pasif, maka dipakai kategorisasi yang dikemukakan oleh Mark Juergenmeyer (2004),¹⁸ yakni adanya gerakan radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Dimana radikalisme lebih mengemukakan persoalan pikiran kelompok atau seseorang yang masih bisa diubah oleh kelompok lainnya. Selain itu, radikalisme ini masih bersifat pasif sehingga memungkinkan adanya intervensi dari pihak lain.

Sementara itu, ekstremisme juga demikian terdapat dua kategori. Terdapat ekstremisme aktif dan ekstremisme pasif. Untuk kelompok ekstremisme pasif kita masih dapat memberikan intervensi sementara ekstremisme aktif kita sulit memberikan intervensi atas mereka sehingga tidak diintervensi. Sedangkan terorisme adalah kelompok yang telah menjalankan aksinya secara aktif sehingga intervensi harus menunggu adanya kesadaran dari pihak yang melakukannya. Jika memperhatikan kategori ini maka perilaku radikalisme di Muhammadiyah masih dapat dikategorikan sebagai bentuk radikalisme dalam pikiran sehingga masih memungkinkan intervensi menjadi moderat. Sementara itu mereka yang terlibat aksi terorisme seperti di Surakarta dan Jawa Barat mereka yang keluar dari Muhammadiyah.

Dengan mengemukakan kerangka teoritik seperti itu, dapatlah disimpulkan bahwa *Sikap Muhammadiyah terhadap Terorisme dan Radikalisme di Jawa Barat dan Kota Surakarta* dilihat dalam pendekatan *sosial movement* yang dipergunakan oleh Quintan Wiktorovicz serta Juergen Meyer ketika melihat gerakan sosial keagamaan sebagai bagian dari gerakan sosial dalam arti yang lebih umum. Hanya saja dalam gerakan keagamaan seringkali dilibatkan di dalamnya isu tentang teologi apakah teologi politik ataukah teologi dalam maknanya sebagai keyakinan atau akidah yang harus dibela oleh seseorang (kolektif).

Pendekatan gerakan sosial dipergunakan dalam kajian tulisan ini karena hendak melihat gejala terjadinya kebangkitan yang dinamakan dengan populisme Islam Indonesia yang dikaitkan dengan tema-tema islamisme seperti radikalisme, terorisme dan ekstremisme. Selain itu sebenarnya agenda apa yang disebarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat luas tergerak untuk

17 Alan Swidler, 2002, *Social Movement and Social Institution*, Sage Publication, USA.

18 Mark Juergenmeyer (2004, *Terror in The Mind of God*, Sage Publication, USA.

melakukan perlawanan atas kondisi sosial politik yang terjadi. Aktor menjadi sangat penting dilihat dalam konteks populisme Islam Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Vedi R Hadiz ketika membahas soal populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah.

Penutup

Memerhatikan apa yang terjadi di Indonesia, umat Islam dan Muhammadiyah khususnya, sebenarnya dapat dikatakan bahwa saat ini politik aliran sebagai penekan oleh kelompok tertentu. Muhammadiyah sebagai salah satu aliran utama Islam Indonesia sebagaimana kita ketahui menjadi idola dari kelompok-kelompok politik. Hanya saja Muhammadiyah yang tampaknya gamang dalam menentukan sikap politiknya secara tegas kemudian oleh beberapa gelintir orang Muhammadiyah mazhab politik memanfaatkan kondisi semacam ini, sekalipun berbeda dengan kebijakan Pimpinan Pusat yang tidak mengarahkan sikap politiknya pada partai tertentu.

Sikap politik Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memberikan kebebasan pada warganya dalam berpolitik akhirnya berada dalam tarian politik beberapa warga yang cenderung pada kandidat presiden, kepala daerah atau legislator sehingga Muhammadiyah di tingkat wilayah atau daerah mengikuti irama pimpinan di level daerah atau wilayah. Jika persoalan seperti ini tidak diselesaikan dengan cepat maka yang akan terjadi selanjutnya adalah Muhammadiyah akan terus dimanfaat oleh segelintir warga Muhammadiyah yang bermazhab politik dalam tarian politik identitas sebagai gerakan penekan seperti dikemukakan oleh Wictorowich dan Mark Juergen Meyer di atas.

Masa depan Muhammadiyah bisa dikatakan pada sikap tegas Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap warganya yang seringkali memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan politik praktisnya. Bahwa warga Muhammadiyah memiliki kebebasan dalam berpolitik merupakan suatu keharusan. Tetapi etika dan tertib organisasi harus menjadi perhatian Pimpinan Pusat Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah di tingkat di bawahnya (kabupaten dan provinsi) tidak terombang-ambing oleh perilaku politik pimpinan dan simpatisan partai politik yang memiliki agendanya sendiri dalam bermanuver politik dan keagamaan yang seringkali tidak sesuai dengan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



Daftar Referensi

- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia :Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar*, 1999.
- Swidler, Alan, *Institution And Religious Movement*, dalam *Cultural Sociology*, An Spilman, Blackwell, England, 2002.
- Effendy, Bahtiar, "Amal Usaha Politik Muhammadiyah", dkk, dalam Zuly Qodir, Achmad Nurmandi, M NurulYamin (ed), *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Usaha*, Pustaka Pelajar Pascasarjana UMY, 2015.
- Bruinessen, Marrin van, *The History of Radicalism in Southeas Asia*, *Journal of Asean Studies*, vol. vii, tahun 2011.
- Juergenmeyer, Mark, *Terror in The Mind of God*, Sage Publication, USA, 2004.
- Eliade, Mircea, terjemahan, *Ikon, Mitos Gerak Kembali pada yang Abadi*, Yogyakarta, 2002.
- Karim, M. Rusli, *Peminggiran Politik Umat Islam*, Tiara Wacana, 2000.
- Wiktorowicz, Quintan, (ed), *Islamic Acitivism, A Social Movement Theory Approach*, 2005 Indiana University Press, USA.
- Hefner, Robert, W. *Civil Islam: Islam and Democratization in Indonesia*, Princeton University, 2000.
- William, RynSwidler, "Social Movement and Sosial Institution", sage publication, 2004. Periksa juga Michele Dillon, (ed), *Handbook of The Sociology of Religion*, Cambridge University Press, 2003.
- Hadiz, Vedi R, *Populisme Islam in Indonesia and the Midlle East*, ISEAS, Singapore, 2015:
- Qodir, Zuly, Achmah Nurmandi, *Amal Usaha Politik Muhammadiyah: Ijtihad Politik Muhammadiyah*, Pascasarjana UMY, 2015.

MUHAMMADIYAH DAN PERGERAKAN POLITIK ALIRAN

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%